

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu Tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Visi, Misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada PERMENDAGRI 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

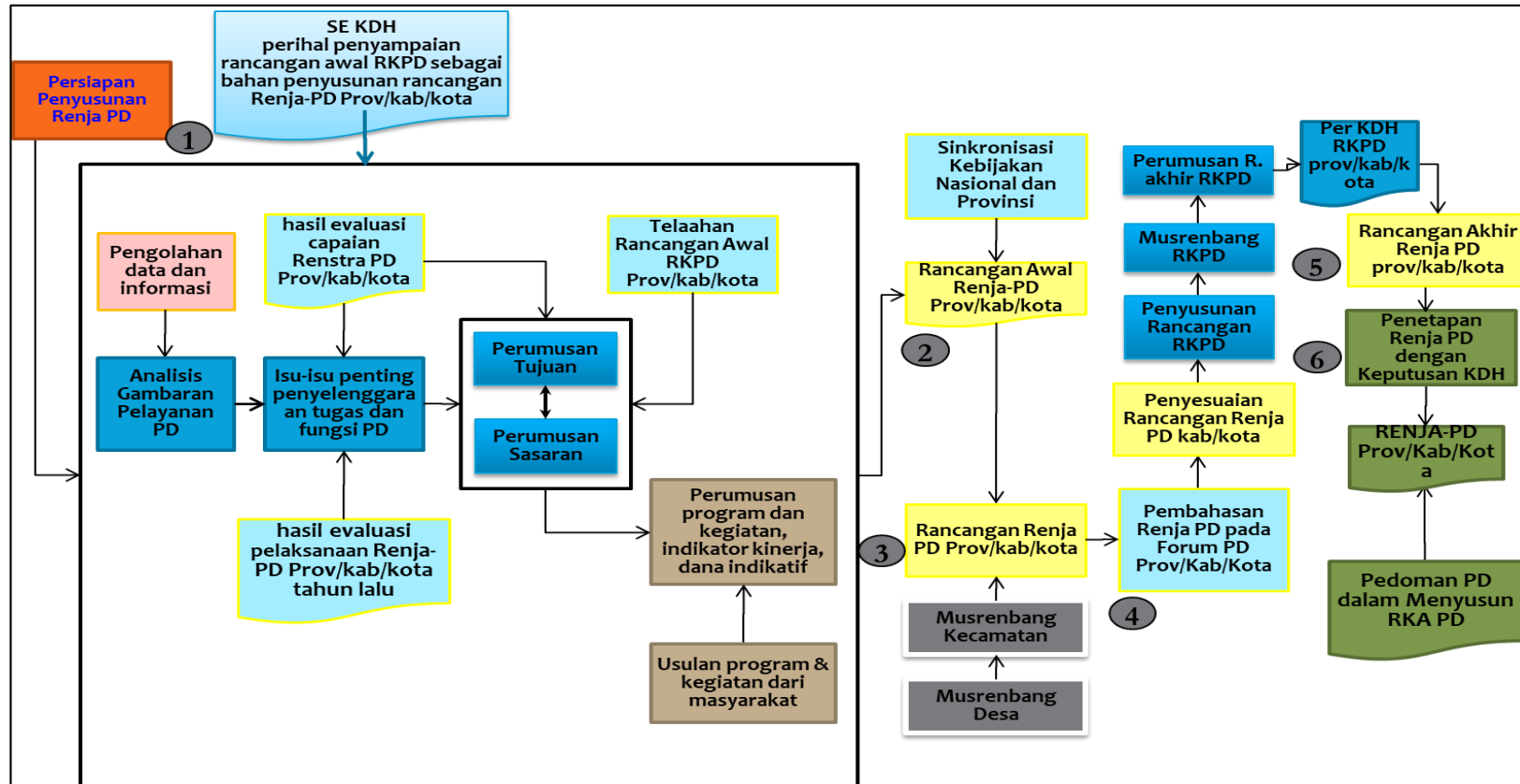
Persyaratan Penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (Outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020.

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Bakesbang dan Politik Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020 sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Keingatannya.

### **BAB V. PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan progra maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Evaluasi meliputi evaluasi kinerja Rencana Kerja Tahun 2018 dan Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun kelima pelaksanaan Renstra 2013 – 2019. Dengan demikian dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Rencana Starategis Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk Kabupaten Sampang.

### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

**Tabel 2.1**  
**Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang**

No	Uraian	Alokasi Biaya			Uraian	Output Keluaran		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%		Target	Realisasi	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	2.021.262.442,00	1.817.935.517,00	89,94		14 bln	14 bln	100
B	BELANJA LANGSUNG (BL)	3.223.492.400,00	2.917.249.128,00	90,50				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282.065.500,00	252.385.982,00	89,48	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.118.000,00	4.637.500,00	65,15	Jumlah Surat yang dikirim	1200 Surat	1287 Surat	107,25
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.500.000,00	48.636.514,00	72,05	Jumlah Pembayaran rekening langganan telepon, air dan listrik	3 Unit	3 Unit	100,00

3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.650.000,00	6.327.000,00	73,14	Jumlah Perpanjangan Ijin STNK	2 Roda 4	2 Roda 4	100,00
						31 Roda 2	31 Roda 2	100,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.237.000,00	41.209.050,00	99,93	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	23 Jenis	23 Jenis	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.497.500,00	21.460.000,00	99,83	Alat Tulis Kantor	ATK 34 Jenis	ATK 34 Jenis	100,00
					Materai 3000	Materai 3000 300 lbr	Materai 3000 : 297 lbr	99,00
					Materai 6000	Materai 6000: 150 lbr	Materai 6000: 150 lbr	100,00
					Perangko	120 lbr	120 lbr	100,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.200.000,00	21.734.000,00	93,68	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	Brg Cetakan : 10 Jenis	Brg Cetakan : 10 Jenis	100,00
						Penggandaan : 30000 Lbr	Penggandaan : 29860 Lbr	99,53
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4.500.000,00	4.440.000,00	98,67	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /	4 Jenis	4 Jenis	100,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000,00	4.166.000,00	81,69	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	7.260.000,00	80,67	Jumlah Surat Kabar	5 Jenis SrtKabar	5 Jenis SrtKabar	100,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00	Jumlah Makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu	Mamin Rapat Sraf : 516 dos	Mamin Rapat Sraf : 516 dos	100,00
						Mamin Tamu VIP : 144 Porsi	Mamin Tamu VIP : 144 Porsi	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	69.195.000,00	69.026.318,00	99,76	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta/kali : 4 kali	Jakarta/kali : 2 kali	50,00
						Surabaya/Kali : 20 kali	Surabaya/K ali : 53 kali	265,00
						Malang/Kali : 4 kali	Malang/Kali : 2 kali	50,00
						Pamekasan/ka li : 10 kali	Pamekasan/ kali : 2 kali	20,00
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	13.728.000,00	12.149.600,00	88,50	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam	12 kali	12 kali	100,00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>460.046.400,00</b>	<b>445.205.759,00</b>	<b>96,77</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	87.000.000,00	85.915.000,00	98,75	Jumlah perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis	100,00
2	Pengadaan Komputer	62.470.000,00	56.552.000,00	90,53	Server (untuk SIORMAS)	1 Unit	1 Unit	100,00
					Printer	4 Unit	4 Unit	100,00
					Wifi Extender)	3 unit	3 unit	100,00
					PC	1 Unit	1 Unit	100,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	46.480.000,00	42.321.550,00	91,05	Gedung kantor yang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80.425.000,00	80.283.524,00	99,82	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	3 Kendaraan	3 Kendaraan	100,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Moubelair	15.835.000,00	15.730.000,00	99,34	Jumlah meubeleaur yg terpelihara secara rutin/berkala	4 unit	4 unit	100,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkalan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.150.000,00	20.918.685,00	90,36	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara secara Rutin/Berkala	Service Mesin Ketik : 6 Kali	Service Mesin Ketik : 3 Kali	50,00
						Service Komputer : 16 Kali	Service Komputer : 12 Kali	75,00
						Service Laptop 2 Kali	Service Laptop 2 Kali	100,00
						Service Printer : 24 Kali	Service Printer : 14 Kali	58,33
						Service AC : 27 Kali	Service AC : 34 Kali	125,92
						Service Kamera : 4 Kali	Service Kamera : 3 Kali	75,00
						Service Handycame : 4 Kali	Service Handycame : 1 Kali	25,00
7	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	144.686.400,00	143.485.000,00	90,36	Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Secara Rutin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.250.000,00	724.119,00	4,20	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			
1	Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	17.250.000,00	724.119,00	4,20	Jumlah aparatur pemerintah yg ikut Bimtek	4 PNS	3 PNS	75,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	23.277.000,00	21.472.500,00	92,25	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.435.000,00	7.087.500,00	84,02	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.222.000,00	2.200.000,00	99,01	Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.980.000,00	2.830.000,00	94,97	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100,00
4	Penyusunan Renja, RKA - DPA SKPD	9.640.000,00	9.355.000,00	97,04	RKA-SKPD dan DPA-SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100,00
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	435.923.000,00	355.986.800,00	81,66	Frekwensi Pertemuan FKUB dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan			
1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa	17.635.000,00	7.010.000,00	39,75	Jumlah Pelaksanaan Upacara Bela Negara	1 Kali	1 Kali	100,00
2	Pemantapan wawasan kebangsaan bagi pejabat aparatur pemerintah dan masyarakat	199.971.000,00	159.305.800,00	79,66	Jumlah Peserta Sosialisasi Penyulahan Pemantapan Ketahanan Bangsa Bagi Aparatur	186 Peserta	186 Peserta	100,00
3	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	123.645.500,00	100.765.500,00	81,50	Jumlah Rakor TIM Pakem	Rakor : 10 kali	Rakor : 10 kali	100,00
4	Forum Kerukunan Umat Beragama	94.671.500,00	88.905.500,00	93,91	Jumlah Rakor Tim FKUB	Rakor : 10 kali	Rakor : 10 kali	100,00
6	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat ( PEKAT )	1.107.819.000,00	1.017.194.814,00	91,82	Cakupan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat) Frekwensi Pertemuan TIM BNK			
1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	558.308.000,00	523.232.414,00	93,72	Jumlah Rakor Tim BNK & Penyuluhan Pencegahan Peredaran Miras dan	Rakor : 12 bln 1400 Peserta	Rakor : 12 bln 1400 Peserta	100,00
2	Peningkatan kapasitas jaringan informasi konflik	304.654.000,00	299.777.400,00	98,40	Rakor Forum Kominda	Rakor : 12 kali	Rakor : 12 kali	100,00
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	244.857.000,00	194.185.000,00	79,31	Rakor FKDM	Rakor : 12 kali	Rakor : 12 kali	100,00
7	Program pendidikan politik masyarakat	897.111.500,00	824.279.154,00	91,88	Cakupan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dan LSM Aktif			
1	Sosialisasi dan Diskusi Politik	64.868.000,00	56.284.273,00	86,77	Jumlah Forum-Forum Diskusi Politik	2 kali	2 kali	100,00
2	Pemberdayaan dan peningkatan kinerja parpol, Keormasan dan LSM	208.812.000,00	185.534.163,00	88,85	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan	100 orang	100 orang	100,00
3	Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pilkada	461.113.000,00	433.733.718,00	94,06	Jumlah Laporan Perkembangan Politik di	2 Laporan	2 Laporan	100,00
4	Peningkatan Pelaksanaan RAN HAM	94.736.500,00	87.467.500,00	92,33	Jumlah Rakor TIM dan Laporan RAN HAM	5 kali	5 kali	100,00
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	67.582.000,00	61.259.500,00	90,64	Jumlah Partai Politik yang di Money	11 Parpol	10 Parpol	90,91
	<b>JUMLAH ( BL + BTL )</b>	<b>5.244.754.842,00</b>	<b>4.735.184.645,00</b>	<b>90,28</b>				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 95,37% atau dapat dikategorikan sangat baik.

### **2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Renstra Bakesbang dan Politik sampai dengan Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 memuat 10 program dan 34 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbang dan Politik dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah/d.Tahun2018**

KODE REKENING	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Tujuan											
	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial politik		Persentase penyelesaian konflik sosial politik	%	100						100	100
	Sasaran											
	Persentase penyelesaian konflik sosial politik		Persentase penurunan potensi konflik	%	100						100	100
<b>4 05 06 32</b>		<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Dini</b>	<b>Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial</b>	%	100							
4. 05 06 32 01		1 Cegah Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Peserta Sosialisasi BNK	Peserta	8400					1400	1400	16,67
			- Jumlah Rakor TIM BNK	Kali	72					12	12	16,67
			- Jumlah Peserta Kaderisasi	Peserta	1800					300	300	16,67
			- Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini	Kali	72					12	12	16,67
4. 05 06 32 02		2 Deteksi Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Rakor TIM FKDM	Kali	72					12	9	12,50
<b>4 05 06 33</b>		<b>Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</b>	<b>Persentase lembaga demokrasi yang dilegalisasi</b>	%	100							
4. 05 06 33 01		1 Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormas dan LSM	- Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	Peserta	3600					200	200	5,56
4. 05 06 33 02		2 Perkembangan Politik Pileg dan Pilpres	- Bantuan Keuangan Partai Politik	Parpol	11					11	11	100,00
			- Jumlah Diskusi Politik	Kali	14					2	2	14,29
<b>4 05 06 34</b>		<b>Program Pengembangan Etika dan Budaya politik</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik</b>									
4. 05 06 34 01		1 Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik	- Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	Peserta	1116					186	186	16,67
4. 05 06 34 02		2 Koordinasi Penegakan HAM	- Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	Kali	40					8	1	2,50
<b>4 05 06 35</b>		<b>Program Integrasi Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Kelompok yang mendapatkan</b>									
4. 05 06 35 01		1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Jumlah Pelaksanaan Upacara Bela Negara	Kali	6					-	0	
			- Lomba Pancasila	Kali	6					-	0	
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Peserta	1200					200	200	16,67
4. 05 06 35 02		2 Pemantapan Pembauran Kebangsaan	- Jumlah Rakor Tim FKUB	Kali	72					12	11	15,28
			- Jumlah Fasilitas Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	Kali	72					10	0	0,00
			- Pakem	Kali	10					10	2	20,00

4.05.06.01		<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	%	100					100	100
4.05.06.01.01		1 Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah Surat Terkirim	Lbr	7200			1200		1214	16,86
			- Jumlah pembayaran Rekening Langganan					3		3	100,00
			- Telepon, Air dan Listrik	Unit	3						
			- Perpanjangan ijin STNK	Roda 2	31			31		31	100,00
				Roda 4	3			3		3	100,00
			- Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	Dos	2640						
			- Alat dan Bahan Kebersihan	Jenis	23			23		23	100,00
4.05.06.01.02		2 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah alat Tulis kantor	Jenis	204			34		34	16,67
			- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	60			10		10	16,67
				Lembar	180000			30000		19490	10,83
			- Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Jenis	42			7		7	16,67
			- Jumlah Surat Kabar	Jenis	2			2		2	100,00
			- Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	Dos	660			660		465	70,45
4.05.06.01.03		3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kali	3300			67		57	1,73
4.05.06.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana apratur dalam keadaan baik</b>	%	100					100	100
4.05.06.02.04		1 Pengadaan / Pemeliharaan peralatan	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jenis	3			3		3	100,00
			- Jumlah Meubelair yang tersedia	Jenis	4			4		4	100,00
			- Jumlah Komputer yang tersedia	Kegiatan	1			1		1	100,00
			- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Jenis	4			4		4	100,00
			- Gedung kantor aparatur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin	Kendaraan R.4	3			3		3	100,00
			- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jenis	3			3		3	100,00
			- Jumlah meubelair yang terpelihara secara rutin / berkala	Jenis	9			9		9	100,00
			- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan & perlengkapan kantor	Buah	64			64		61	95,31
4.05.06.03		<b>Program Peningkatan kapasitas</b>	<b>Prosentase Peningkatan Kapasitas</b>	%	100						
4.05.06.03.01		Pelaksanaan Bimtek / Sosial / Seminar	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	PNS	24			4		3	12,50
4.05.06.04		<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>	%	100					100	100
4.05.06.04.01		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6			1		1	16,67
			- Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	6			1		1	16,67
			- Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	6			1		1	16,67
4.05.06.04.02		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Laporan	18			3		3	16,67
4.05.06.04.03		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	Laporan	12			2		2	16,67

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2017 dan 2018 nihil, dikarenakan Periode Resntra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai hanya Tahun 2019 saja;
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.

## 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbang & Politik Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2013-2018 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD 2019 - 2024				Realisasi		Proyeksi		Catatan
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase penurunan potensi konflik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

## 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang No. 58 Tahun 2008 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mempunyai tugas pokok : “ Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan, Serta Melakukan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri “

.Sebagaimana termuat dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Bakesbang dan Politik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
- 2) Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
- 3) Kurangnya tingkat kepedulian / sikap apatis masyarakat
- 4) Lemahnya jaringan koordinasi antara aparat dan instansi/lembaga pemantau di lapangan, serta belum adanya aplikasi pelaporan terpadu.

### **2.3 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.
4. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2020 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 dengan kebutuhan riil Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.



Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Sampang**

No	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020						HASIL ANALISA KEBUTUHAN BAPPSELITBANGDA TAHUN 2020					
	KODE REKENING	Usuran Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Usuran Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4.05.06.01	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>				<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>				
	4.05.06.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah Surat Terkirim - Jumlah pembayaran Rekening Langganan - Telepon, Air dan Listrik - Perpanjangan ijin STNK	Sampang	1200 lbr 3 Unit	96.832.400	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah Surat Terkirim - Jumlah pembayaran Rekening Langganan - Telepon, Air dan Listrik - Perpanjangan ijin STNK	Sampang	1200 lbr 3 Unit	96.832.400	
			- Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan - Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu		31 Roda 2 dan 3 Roda 4 516 dos untuk rapat dan 144 untuk tamu			- Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan - Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu		31 Roda 2 dan 3 Roda 4 516 dos untuk rapat dan 144 untuk tamu		
	4.05.06.01.02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah alat Tulis kantor - Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan - Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Sampang	34 Jenis 10 Jenis dan 30000 lembar 7 Jenis	128.479.065	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah alat Tulis kantor - Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan - Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Sampang	34 Jenis 10 Jenis dan 30000 lembar 7 Jenis	128.479.065	
			- Alat dan Bahan Kebersihan		23 Jenis			- Alat dan Bahan Kebersihan		23 Jenis		
	4.05.06.01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sampang	67 kali	48.107.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sampang	67 kali	48.107.000	
2	4.05.06.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana apratur dalam keadaan baik</b>				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana apratur dalam keadaan baik</b>				
	4.05.06.02.01	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	- Gedung kantor apparatur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin	Sampang	3 Kegiatan	88.874.750	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	- Gedung kantor apparatur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin	Sampang	3 Kegiatan	88.874.750	
	4.05.06.02.03	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara - Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		3 Kendaraan Roda 4 1 Kendaraan Roda 2	69.430.000	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara - Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		3 Kendaraan Roda 4 1 Kendaraan Roda 2	69.430.000	
	4.05.06.02.04	Pengadaan / Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor - Jumlah Meubelair yang terpelihara secara rutin/berkala - Jumlah Pengadaan Komputer - Jumlah Pengadaan Pengadaan Meubelair - Jumlah Pengadaan Alat Pendinginan - Jumlah Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) / Karpet - Jumlah Pengadaan Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	Sampang	3 Jenis 9 Jenis 3 Jenis 1 unit 1 buah 2 unit 12 meter 1 unit	141.800.000	Pengadaan / Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor - Jumlah Meubelair yang terpelihara secara rutin/berkala - Jumlah Pengadaan Komputer - Jumlah Pengadaan Pengadaan Meubelair - Jumlah Pengadaan Alat Pendinginan - Jumlah Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) / Karpet - Jumlah Pengadaan Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	Sampang	3 Jenis 9 Jenis 3 Jenis 1 unit 1 buah 2 unit 12 meter 1 unit	141.800.000	
3	4.05.06.03	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>				<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>				
	4.05.06.03.01	Pelaksanaan BinteK / Sosial / Seminar	- Jumlah Pegawai yang mengikuti BinteK	Sampang	4 PNS	17.250.000	Pelaksanaan BinteK / Sosial / Seminar	- Jumlah Pegawai yang mengikuti BinteK	Sampang	4 PNS	17.250.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	4 05 06 04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik				Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik				
	4. 05 06 04. 01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Laporan Keuangan Semesteran - Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sampang	1 Laporan	13.445.000	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Laporan Keuangan Semesteran - Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sampang	1 Laporan	13.445.000	
	4. 05 06 04. 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Sampang	3 Laporan	13.160.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Sampang	3 Laporan	13.160.000	
	4. 05 06 04. 03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	Sampang	2 Paket	15.000.000	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	Sampang	2 Paket	15.000.000	
5	4 05 06 32	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial			931.287.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial			931.287.000	
	4. 05 06 32. 01	1 Cegah Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Peserta Sosialisasi BNK - Jumlah Rakor TIM BNK - Pengkaderan P4GN - Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini	Sampang	1400 Peserta 12 Kali 300 orang 12 Kali	767.341.000	1 Cegah Dini	- Jumlah Peserta Sosialisasi BNK - Jumlah Rakor TIM BNK - Pengkaderan P4GN - Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini	Sampang	1400 Peserta 12 Kali 300 orang 12 Kali	767.341.000	
	4. 05 06 32. 02	2 Deteksi Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Rakor TIM FKDM	Sampang	12 bulan	163.946.000	2 Deteksi Dini	- Jumlah Rakor TIM FKDM	Sampang	12 bulan	163.946.000	
6	4 05 06 33	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	dilegalisasi			365.673.000	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	dilegalisasi			365.673.000	
	4. 05 06 33. 01	Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM	- Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	Sampang	300 Peserta	199.290.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM	- Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	Sampang	300 Peserta	199.290.000	
	4. 05 06 33. 02	Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg dan Pilpres	- Bantuan Keuangan Partai Politik - Jumlah Diskusi Politik	Sampang	11 Parpol 2 Kali	166.383.000	Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg dan	- Bantuan Keuangan Partai Politik - Jumlah Diskusi Politik	Sampang	11 Parpol 2 Kali	166.383.000	
7	4 05 06 34	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik			211.597.000	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik			211.597.000	
	4. 05 06 34. 01	Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik	- Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	Sampang	186 Peserta	169.004.000	Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik	- Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	Sampang	186 Peserta	169.004.000	
	4. 05 06 34. 02	Koordinasi Penegakan HAM	- Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	Sampang	8 kali	42.593.000	Koordinasi Penegakan HAM	- Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	Sampang	8 kali	42.593.000	
8	4 05 06 35	Program Integrasi Kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan Wawasan Kebangsaan			532.747.000	Program Integrasi Kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan Wawasan Kebangsaan			532.747.000	
	4. 05 06 35. 01	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Sampang	200 Peserta sosialisasi	228.315.000	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Sampang	200 Peserta sosialisasi	228.315.000	
	4. 05 06 35. 02	Pemantapan Pembauran Kebangsaan	- Jumlah Rakor Tim FKUB - Jumlah Fasilitas Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	Sampang	6 Bulan 6 Bulan	304.432.000	Pemantapan Pembauran Kebangsaan	- Jumlah Rakor Tim FKUB - Jumlah Fasilitas Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	Sampang	6 Bulan 6 Bulan	304.432.000	
<b>TOTAL</b>						<b>2.673.682.215</b>	<b>TOTAL</b>					
						<b>2.673.682.215</b>						

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2020 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2020**

Perangkat Daerah: Bappelitbangda Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dengan Tema “Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”.

Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2020**

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	<b>Prioritas 1:</b> Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan
			<b>Prioritas 4:</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan	Pemerataan pembangunan dan	<b>Prioritas 3:</b> Peningkatan dan

	pemerataan wilayah	penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja	<b>Prioritas 2:</b> Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	<b>Prioritas 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkandengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Bakesbang dan Politik yang telah dituangkan dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Bakesbang dan Politik pada Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penyelesaian konflik sosial politik	100,00

	<b>Sasaran:</b>			
1	Persentase penyelesaian konflik sosial politik	1	Persentase penurunan potensi konflik	100,00

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020

Dalam merumuskan program kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian **misi 5** yaitu **“Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

#### b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik”**.



Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Peningkatan Kewaspadaan Dini
- Program Pemantapan dan Pengadaan Kelembagaan Demokrasi
- Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik
- Program Integrasi Bangsa
- Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bappelitbangda mengampu urusan Unsur Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Program-program Bappelitbangda pada Tahun 2020 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 5. “Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat**” sebagaimana tertuang pada RKPd Kabupaten Sampang Tahun 2020. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Bakesbangpol Tahun 2020**

KODE REKENING	Usuran Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Bakesbangpol		2.556.000.451
	Belanja Langsung			
4.05.06.01	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>		
4.05.06.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah Surat Terkirim - Jumlah pembayaran Rekening Langganan Telepon, Air dan Listrik - Perpanjangan ijin STNK - Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan - Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	1200 lbr 3 Unit 31 Roda 2 dan 3 Roda 4 2 Jenis 516 dos untuk rapat dan 144 untuk tamu	96.832.400
4.05.06.01.02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah alat Tulis kantor - Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor - Alat dan Bahan Kebersihan	34 Jenis 10 Jenis dan 30000 lembar 7 Jenis 23 Jenis	128.479.065
4.05.06.01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	67 kali	48.107.000
4.05.06.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana apratur dalam keadaan baik</b>		
4.05.06.02.01	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	- Gedung kantor apratur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin	3 Kegiatan	88.874.750
4.05.06.02.03	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara - Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Kendaraan Roda 4 1 Kendaraan Roda 2	69.430.000
4.05.06.02.04	Pengadaan / Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor - Jumlah Meubelai yang terpelihara secara rutin/berkala - Jumlah Pengadaan Komputer - Jumlah Pengadaan Pengadaan Meubelair - Jumlah Pengadaan Alat Pendinginan - Jumlah Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) / Karpet - Jumlah Pengadaan Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3 Jenis 9 Jenis 3 Jenis 1 unit 1 buah 2 unit 12 meter 1 unit	141.800.000
4.05.06.03	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>		
			4 PNS	250.000

1	2	3	4	5
4 05 06 04	<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>		
4 05 06 04 01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Laporan Keuangan Semesteran - Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	13.445.000
4 05 06 04 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	3 Laporan	13.160.000
4 05 06 04 03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	2 Paket	15.000.000
4 05 06 32	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Dini</b>	<b>Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial</b>		931.287.000
4 05 06 32 01	1 Cegah Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Peserta Sosialisasi BNK - Jumlah Rakor TIM BNK - Pengkaderan P4GN - Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini	1400 Peserta 12 Kali 300 orang 12 Kali	767.341.000
4 05 06 32 02	2 Deteksi Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Rakor TIM FKDM	12 bulan	163.946.000
4 05 06 33	<b>Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</b>	<b>dilegalisasi</b>		365.673.000
4 05 06 33 01	Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM	- Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	300 Peserta	199.290.000
4 05 06 33 02	Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg dan Pilpres	- Bantuan Keuangan Partai Politik - Jumlah Diskusi Politik	11 Parpol 2 Kali	166.383.000
4 05 06 34	<b>Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik</b>		211.597.000
4 05 06 34 01	Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik	- Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	186 Peserta	169.004.000
4 05 06 34 02	Koordinasi Penegakan HAM	- Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	8 kali	42.593.000
4 05 06 35	<b>Program Integrasi Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan Wawasan Kebangsaan</b>		532.747.000
4 05 06 35 01	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	200 Peserta sosialisasi	228.315.000
4 05 06 35 02	Pemantapan Pembauran Kebangsaan	- Jumlah Rakor Tim FKUB - Jumlah Fasilitasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	6 Bulan 6 Bulan	304.432.000
				<b>5.229.682.666</b>

Pada Tahun 2020 Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang lainnya dengan total anggaran Rp. 5.229.682.666,00 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp 2.556.000.451,00 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp 2.673.682.215,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 8 program dan 18 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampa

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu **“Peningkatkan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabarannya bertujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“ Meningkatkan penyelesaian konflik sosial politik “ Hasil evaluasi atas Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 90,28 % atau dapat dikategorikan Sangat baik.**

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah **“ Meningkatkan penyelesaian konflik sosial politik ”** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: **Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial.**

Pada tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang lainnya dengan total anggaran Rp. 5.229.772.667,80 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.556.090.451,80 dan Belanja Langsung sebesar Rp2.673.682.215,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 8 Program dan 18 kegiatan.** Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan lingkup Kabupaten Sampang.

### 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2020, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di

rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

